

PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS

Bayu Dwi Anggono, Emanuel Raja Damaitu

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi)

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan Nomor 37, Jember, Jawa timur

Email: bayu_fhunej@yahoo.com dan emanuel.damaitu@gmail.com

Abstract

Indonesia gets bonuses and challenges before heading for the golden Indonesian period when it turns 100 years old in 2045. The challenges faced by Indonesia in preparing this demographic bonus are also quite large. One of them is the entry of radicalism and anti-Pancasila ideology in Indonesia. These challenges are not only the responsibility of the government to solve them, but also all levels of society. Facing this demographic bonus, all layers of Indonesian people must see that it is necessary to strengthen the values of Pancasila in order to become a living ideology. Strengthening values for the young generation of Indonesia must be done in creative, contextual ways and still based on the roots of Indonesian culture.

Keyword: *The Value of Pancasila; Golden Indonesia; Youth.*

Abstrak

Indonesia mendapatkan bonus dan tantangan sebelum menuju Indonesia emas pada saat genap berumur 100 tahun pada 2045. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mempersiapkan bonus demografi ini juga cukup besar. Salah satunya adalah masuknya paham radikalisme dan ideologi anti Pancasila di Indonesia. Tantangan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya namun juga seluruh lapisan masyarakat. Menghadapi bonus demografi ini, seluruh lapisan manusia Indonesia harus melihat bahwa diperlukan sebuah penguatan nilai-nilai Pancasila agar menjadi sebuah ideologi yang hidup. Penguatan nilai-nilai kepada generasi muda Indonesia harus dengan cara-cara yang kreatif, kontekstual dan tetap berlandaskan pada akar budaya Indonesia.

Kata kunci: Nilai Pancasila; Indonesia Emas; Pemuda.

A. Pendahuluan

Indonesia mendapatkan bonus dan tantangan sebelum menuju Indonesia emas pada saat genap berumur 100 tahun pada 2045. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Indonesia sedang menerima bonus demografi dengan besarnya jumlah penduduk yang pada masa usia produktif, yaitu 15 hingga 64 tahun meningkat (Media, 2018). Bonus demografi ini akan memuncak sekitar pada tahun 2030 dimana komposisi

penduduk Indonesia pada tahun tersebut akan didominasi oleh kelompok usia produktif (Yuswohady, 2017). Artinya posisi para pemuda Indonesia pada khususnya akan sangat meningkat dalam kondisi tahun-tahun tersebut dan menjadi modal Sumber Daya Manusia dalam pembangunan nasional. Bonus demografi ini ternyata juga mempunyai dampak buruk jika tidak dipersiapkan dengan sangat baik

sebagaimana yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo (Media, 2018).

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mempersiapkan bonus demografi ini juga cukup besar. Salah satunya adalah masuknya paham radikalisme dan ideologi anti Pancasila di Indonesia. Penyebaran paham radikalisme menjadi tantangan terbesar saat ini bukan hanya oleh Indonesia melainkan juga seluruh bangsa yang ada di dunia. Yenny Wahid, selaku direktur Wahid Institute, menyebutkan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaganya tersebut sebanyak 11 juta orang bersedia melakukan tindakan radikalisme dan intolerans (M. A. Putra, 2017). Yenny Wahid pun menambahkan bahwa terdapat fenomena yang menarik mengenai perekrutan yang sistematis bagi kelompok-kelompok radikal (Armenia, 2016). Target perekrutan tersebut adalah siswa-siswa dan mahasiswa yang cenderung berperilaku lebih baik sebelum direkrut oleh kelompok tersebut. Selain itu, Yenny pun menjelaskan bahwa mahasiswa yang direkrut ini semakin gencar mengekspresikan kepedulian dan dukungannya terhadap negara-negara yang sedang berkonflik atas nama agama. Tahapan berikutnya, mahasiswa maupun siswa yang sudah terpapar kelompok radikal ini akan mengeksklusifkan dirinya dan menganggap dirinya adalah yang paling benar.

Melihat fenomena faktual ini, jika dikaitkan dengan bonus demografi Indonesia maka akan menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi bangsa ini untuk mencapai moment Indonesia emas pada 2045. Bonus demografi yang juga merupakan generasi milenial menjadi sangat rentan dan sasaran utama kelompok radikal. Generasi milenial adalah generasi yang tumbuh pada era *internet booming* yang memiliki beberapa ciri yaitu karakteristik masing-masing individu berbeda bergantung pada tempat dimana individu ini dibersarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya. Berikutnya pola interaksi sangat terbuka

dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi milenial juga merupakan pengguna sosial media yang sangat fanatik dan bahkan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi. Selain itu mereka juga lebih terbuka pandangan politik dan ekonomi sehingga sangat reaktif terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan yang ada di sekelilingnya (Y. S. Putra, 2016, p. 129).

Generasi milenial yang sangat dekat dengan teknologi dan sosial media akan sangat mudah terpengaruh hasutan-hasutan kelompok radikal dan anti Pancasila melalui sumber-sumber informasi media internet. Noor Izza menyebutkan bahwa aduan mengenai konten *hoax* dan radikalisme meningkat cukup tajam pada pertengahan tahun 2017 lalu khususnya pada saat momen pilkada DKI Jakarta (Ayuwuragil, 2017). Konten-konten mengenai *hoax* dan radikalisme ini semakin hari semakin meningkat dan gencar disebarkan di sosial media yang dekat dengan generasi milenial.

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ditemukan bahwa sekitar 39% mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi terpapar radikalisme (Akbar, 2018).melalui penelitian tersebut juga diketahui bahwa paham radikalisme yang dianut oleh para mahasiswa tersebut adalah peningkatan paham konservatif keagamaan. Sejatinya mahasiswa atau pemuda Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan masyarakat madai. Selain itu, kecenderungan mahasiswa mudah terpapar oleh paham radikalisme ini karena dekatnya kaum muda dengan media-media sosial dimana paham radikalisme ini juga sudah mulai tersebar melalui dunia maya (News, 2019).

Tantangan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya namu juga seluruh lapisan masyarkat. Pada perayaan HUT Indonesia yang ke-73 lalu, Presiden Joko Widodo (Kuwado, 2018) memberikan pesan bahwa Indonesia harus mengedepankan

persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan pembangunan bangsa. Menurut presiden, modal paling penting dalam membangun negara Indonesia adalah persatuan dan kesatuan agar menjadi sebuah kekuatan yang disegani oleh bangsa lain. Lebih lanjut presiden juga mengingatkan kembali bahwa rasa persatuan dan kesatuan ini harus mencontoh para pendiri bangsa Indonesia yang menyingkirkan segala perbedaan pandangan politik, suku, ras, dan agama demi mewujudkan Indonesia yang merdeka (Erwanti, 2018).

Oleh karena itu, tulisan ini akan mengupas kembali bahwa pemuda Indonesia yang merupakan bonus demografi Indonesia ini harus melihat kembali perannya sebagai tunas pembangunan bangsa. Berikutnya penulis akan mengajak para pemuda Indonesia untuk menggali kembali makna nilai-nilai dari Pancasila sebagai pondasi dan semangat awal untuk memerangi radikalisme dan menuju Indonesia emas 2045. Selain itu, pendalaman karakter manusia Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila akan menjadi tameng yang cukup kuat untuk menangkal paham-paham radikalisme.

B. Pembahasan

1. Penguatan Kembali Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang utuh tak terpisahkan dan mempunyai banyak sekali fungsi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Secara umum banyak sekali disingung dan diajarkan bahwa Pancasila mempunyai dua fungsi yaitu sebagai dasar negara dan sebagai dasar falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Begitu banyaknya fungsi dari Pancasila ini, Dominikus Rato (Rato, 2017, p. 189) menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi yang hidup dan dapat diketahui dari tiga indikator. Indikator

tersebut adalah *adaptif-aktif*, *responsive*, dan *aplikatif*.

Indikator pertama adaptif-aktif maksudnya adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam tiap-tiap Sila Pancasila ini selalu mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman (Rato, 2017, p. 189). Nilai-nilai di dalam Pancasila ini telah menjadi bagian dari seluruh tubuh, jiwa, dan raga manusia Indonesia. Nilai tersebut menjadi sebuah pondasi dalam setiap sendi kehidupan manusia Indonesia yang tidak harus diganti melainkan selalu diperkaya akan nilai-nilai positif dalam perubahan zaman. Maksudnya bahwa dalam menghadapi setiap perubahan zaman, nilai-nilai Pancasila ini tidak menggantikan nilai-nilai lama yang telah digali oleh Soekarno dan *founding fathers* lainnya melainkan menyesuaikan diri pada zaman yang baru ini.

Responsive sebagai indikator kedua maksudnya adalah bahwa nilai-nilai di dalam Pancasila mampu menerima atau mengakomodasi perubahan-perubahan sosial masyarakat dengan menerima setiap elemen sosial-budaya dari asing dengan maksud untuk memperkaya elemen sosial-budayanya sendiri (Rato, 2017, p. 189). Berkaitan dengan indikator yang pertama tadi, bahwa nilai-nilai di dalam Pancasila ini dalam menghadapi perubahan harus bersifat dinamis dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Makna perubahan bukan berarti harus mengubah secara keseluruhan pokok atau dasar yang terkandung dalam nilai-nilai tersebut melainkan mengambil nilai-nilai perubahan yang semakin memperkokoh pondasi tersebut. Nilai-nilai di dalam perubahan zaman dan masyarakat ini tidaklah semua buruk untuk dihindari, namun tidak semua baik untuk diambil. Memperkaya

nilai-nilai elemen sosial budaya tersebut tetap harus memperhatikan karakter dasar atau jati diri bangsa Indonesia dengan tetap melihat nilai-nilai di dalam Pancasila.

Indikator ketiga Pancasila adalah aplikatif. Maksud dari aplikatif adalah nilai-nilai Pancasila dapat diaplikasikan atau diterapkan di masyarakat (Rato, 2017, p. 189). Nilai-nilai dari Pancasila ini tidak sekedar sebuah tulisan tanpa makna, melainkan sebuah panduan bagi masyarakat untuk dapat hidup dengan rukun dalam masyarakat yang berbhineka tunggal ika. Sebuah tuntunan pula bagi pemerintah untuk mengarahkan setiap kebijakannya menuju cita-cita bangsa. Pancasila hanya akan menjadi layaknya benda mati jika tidak pernah diaplikasikan dan dihidupi dalam setiap nafas kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia.

Pada era milenial saat ini yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan berarti nilai-nilai Pancasila tersebut harus berganti secara rasional mengikuti perkembangan zaman. Nilai Ke-Tuhan-an Yang maha Esa sebagaimana terkandung di dalam sila pertama Pancasila akan tetap selalu memiliki nilai yang sama hingga saat ini. Soekarno ketika menggali nilai dalam sila pertama ini menyebutkan bahwa nilai Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa adalah salah satu elemen yang mampu mempersatukan batin seluruh bangsa Indonesia dengan cara yang semesra-mesranya (IX, 2018, p. 89). Perumusan sila pertama ini adalah bukan hanya sebatas 'Tuhan' yang dikenal dalam agama yang diakui di Indonesia melainkan seluruh konsep ke-Tuhan-an mereka yang bernafaskan pada sebuah keyakinan dan kepercayaan. Semangat kebhinekaan tunggal ika harus menjadi sebuah

semangat kebangsaan yang memberikan penghargaan atas keberagaman dan perbedaan yang merupakan anugerah bangsa Indonesia. Penggunaan istilah bhineka tunggal ika lebih tepat untuk menggambarkan semangat Indonesia bila dibandingkan multikulturalisme maupun pluralisme. Baik multikulturalisme maupun pluralisme lebih menonjolkan bahwa perbedaan adalah sebuah kekuatan mayoritas untuk memenangkan sebuah kontestasi politik (Damaitu, 2018).

Nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini memberikan makna bahwa setiap manusia harus mampu bersikap, berpikir, dan berlaku adil dengan cara-cara yang beradab (Damaitu & Saptarini, 2017, p. 293) Namun pada kenyataan di masyarakat banyak yang akhirnya menyalahartikan nilai dalam sila kedua Pancasila hanya sebatas nilai kemanusiaan saja. Pada lambang Garuda Pancasila, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini dilambangkan dengan rantai yang terdiri dari gelang persegi dan bundar yang tidak terputus. Soekarno (IX, 2018, p. 117) menjelaskan bahwa rantai dengan pergelangan-pergelangan yang tidak terputus tersebut memberikan makna sebuah rantai kemanusiaan yang tidak ada putus-putusnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu bangsa yang berdiri sendiri melainkan satu bangsa dalam keluarga bangsa-bangsa. Indonesia memiliki beragam agama, suku / etnis, dan bahasa. Tercatat pada data tahun 2016 yang terdapat sekitar 250 suku/etnis yang ada di Indonesia. Selain itu mayoritas masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah dibandingkan dengan bahasa Indonesia (Dokhi et al., 2016, pp. 28–

29). Keberagaman tersebut bukanlah sebuah ancaman melainkan sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia mampu lepas dari penjajahan yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia karena bersatunya seluruh manusia Indonesia dengan kesadran bersama untuk hidup damai dan sejahtera.

Perkembangan teknologi di era milenial ini cenderung mengarahkan manusia-manusia Indonesia untuk hidup secara individual. Segala kebudayaan dan nilai-nilai budaya asing mengalir sangat deras mengancam nilai-nilai kebudayaan bangsa kita melalui sosial media dan media informasi lainnya yang dapat diakses dengan sangat mudah melalui gawai elektronik. Seharusnya aliran-aliran informasi yang sangat deras melaju pada kehidupan manusia Indonesia saat ini dapat digunakan untuk saling memperkaya kekuatan persatuan dan kemanusiaan Indonesia. Pada era milenial ini, manusia Indonesia sangat menginginkan sebuah kebebasan individu. Akan tetapi kebebasan individu ini berkaitan dengan adab atau budaya yang ada di Indonesia dan harus terdapat sebuah penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk mencapai keadilan atas kemanusiaan yang sangat beradab (Damaitu & Saptarini, 2017, p. 294)

Nilai yang terkandung di dalam sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nilai ini akan mempunyai pemaknaan yang berbeda jika hanya disebut dengan nilai persatuan. Maka akan menjadi sebuah perebutan kekuasaan antara persatuan kelompok yang mempunyai kekuatan lebih atau mayoritas. Bahkan akan sangat mungkin terjadi persatuan antara kelompok masyarakat yang paling dekat dengan penguasa untuk melanggengkan kekuasaan ini (Damaitu, 2018). Nilai Persatuan

Indonesia juga dapat dikatakan mengandung makna sebagai usaha kearah bersatunya seluruh manusia Indonesia dalam membina rasa nasionalisme untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai ini pun sekaligus mengakui dan menghargai keanekaragaman yang dimiliki Bangsa Indonesia yang dibalut dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Soekarno menjelaskan bahwa nilai kebangsaan ini beliau ambil dari dua pemikir besar dunia yaitu Ernest Renan dan Otto Bauer. Bangsa adalah segerombolan manusia yang mempunyai kesamaan kehendak untuk bersatu dan mempunyai persamaan karakter yang berdiam di atas suatu wilayah geopolitik yang nyata sebagai satu kesatuan (IX, 2018, p. 103) Sebuah rasa kebangsaan secara singkat adalah kesatuan antara manusia Indonesia dengan tanah airnya. Berdasarkan data sebelumnya dikatakan bahwa Indonesia terdiri dari 250 suku/etnis dan itulah Indonesia buka masing-masing suku atau etnis itu berdiri sendiri.

Nilai keempat yang tertuang di dalam sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai ini pun bukan hanya sebatas nilai kerakyatan atau nilai demokrasi saja akan tetapi mempunyai nilai yang lebih mendalam dengan memunculkan karakter bangsa Indonesia yaitu demokrasi musyawarah untuk mencapai mufakat. Soekarno pun mengatakan bahwa demokrasi yang disebutkan sebagai dasar dari sila keempat ini tidak perlu "identik" sama dengan dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain melainkan demokrasi yang bercorak kepribadian bangsa Indonesia (IX, 2018, p. 146). Demokrasi ini bukan

hanya sebuah alat teknis melainkan kesatuan alam jiwa perasaan atas penyelenggaraan cita-cita satu masyarakat yang adil dan makmur.

Yudi Latif (2011, p. 477) menyebutkan bahwa demokrasi yang terdapat di dalam nilai sila keempat ini terdiri dari kedaulatan rakyat dan permusyawaratan. Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Cita-cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Masyarakat demokratis dilahirkan dalam sebuah kegiatan musyawarah dan pembahasan yang hasil dan mutunya bergantung kepada para peserta yang taat dan setia kepada aturan dan pembahasan dalam musyawarah (Sinal, 2017, p. 199). Nilai dalam sila keempat ini tidak hanya berbicara bahwa sebuah sistem kerakyatan dan demokrasi yang hanya dapat dilaksanakan dalam kontestasi politik saja, melainkan dalam setiap lapisan masyarakat. Setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kedudukan yang sama ketika membicarakan sebuah jalan keluar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Prinsip di dalam musyawarah tidak ada sebuah kebenaran mutlak atau dalil-dalil yang tidak bisa ditawar dan membawa semangat berdialogika.

Nilai kelima yang terkandung didalam sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menunjukkan sebuah tujuan akhir dari sebuah

revolusi yang berdasarkan pada Pancasila. Soekarno (IX, 2018, p. 169) menyebutkan bahwa revolusi Indonesia itu bermula dua layaknya mata uang yaitu muka sosial dan muka politik. Revolusi ini untuk mencapai satu Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berdaulat penuh untuk mengadakan satu masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan ini sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 akan tetapi dengan sedikit rumusan yang berbeda yakni perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Kaelan, 2013, pp. 390–397).

Keadilan merupakan norma yang bersifat universal bagi setiap manusia dan akan mempunyai makna jika tidak ada tuntutan yang bersifat sewenang-wenang terhadap orang lain. Mohamad Sinal (2017, pp. 222–228) berpendapat bahwa implikasi dari keadilan sebagai sebuah norma yang bersifat universal akan terlihat jelas dalam dua hal yaitu keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Pancasila melihat manusia Indonesia sebagai satu keluarga yang mempunyai derajat sama di muka hukum dan pemerintahan sehingga memungkinkan setiap orang untuk memperoleh hak atas sumbangannya terhadap masyarakat terhadap produksi sosial.

2. Pemuda dan Jati diri Bangsa dalam Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan kegiatan negara untuk mencapai tujuan hakiki dari negara tersebut. Pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi seluruh bidang kehidupannya baik jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Pancasila sebagai orientasi

bangsa dan negara harus dijadikan paradigma dalam pembangunan nasional di segala bidang, tak terbatas pada aspek ekonomi saja (Sinal, 2017, p. 16). Tentunya, sebagai tonggak pembangunan nasional negara Indonesia adalah generasi muda bangsa ini.

Peran pemuda di dalam sejarah pembangunan bangsa Indonesia selalu pada posisi yang paling penting. Pertama dapat dilihat pada sejarah organisasi pemuda pertama Indonesia, Budi Utomo (Ricklefs, 2005, pp. 249–251), yang didirikan pada tahun 1908 sebagai tonggak sejarah kepemudaan Indonesia. Berikutnya 20 tahun sejak berdirinya Budi Utomo ini, pemuda Indonesia kembali membangun tonggak perjuangan Indonesia menjadi lebih kuat dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sartono Kartodirdjo (Suwirta, 2015) seorang sejarawan Indonesia menyebutkan hal yang paling signifikan dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah manifesto politik perhimpunan Indonesia di Belanda yang membahas tentang dasar-dasar dan modal untuk mewujudkan sebuah negara Indonesia yang merdeka. Selain itu kelompok pemuda pula yang mendorong untuk dipercepatnya proses proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pada masa penjajahan Indonesia kala itu, generasi muda dikatakan sebagai generasi pelopor bangsa Indonesia. Generasi muda sebagai generasi pelopor karena memiliki sikap altruis yaitu sikap rela berkorban demi kepentingan orang banyak dan melahirkan pemikiran-pemikiran yang visioner (Hariyono, 2014, p. 167). Nasionalisme dan Ideologi Pancasila yang merupakan produk pemikiran generasi muda kala itu digunakan sebagai *counter ideology* terhadap penindasan kolonialisme, imperialisme, dan feodalisme. Seluruh

faham yang dilawan oleh Nasionalisme dan ideologi Pancasila kala itu menyebabkan kemiskinan dan kebodohan seluruh masyarakat Nusantara dengan selalu menekankan eksploitasi, dominasi, dan hegemoni terhadap masyarakat Nusanara.

Pasca kemerdekaan, aktifitas kelompok pemuda pun masih menjadi garda terdepan untuk menjatuhkan rezim pemerintahan yang otoriter. Sebagai salah satu contoh, pada era reformasi, mahasiswa turun ke jalan untuk menggulingkan Presiden Soeharto (Widyanto, 2010). Sehingga dapat dilihat bahwa peran pemuda di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini sangatlah penting sebagai pemegang estafet kepemimpinan bangsa.

Saat ini tantangan terbesar bangsa Indonesia dengan bonus demografi ini menunjukkan kecenderungan untuk abai dengan tantangan masyarakat dan bangsanya. Marshall Sylver sebagaimana dikutip oleh Hariyono (2014, pp. 33–34) menyebutkan bahwa sebagian besar anak-anak muda berpikir dan bertindak tanpa kesadaran kritis. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa para pemuda ini tidak akan mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya secara maksimal. Pemuda Indonesia selain sebagai sebuah bonus demografi, dia juga merupakan pewaris dari bangsa Indonesia. Sehingga perlu menjadi pemahaman bersama bahwa jika hal ini tidak diubah dan diperbaiki maka Pancasila hanya akan menjadi sebuah benda mati.

Pertama yang harus dipahami bahwa para pemuda Indonesia adalah ahli waris dari Pancasila. Kemudian sebagai sang pewarisnya bukanlah para pejuang nasional masa lalu, bukanlah para bapak pendiri bangsa, melainkan sang ‘Ibu Pertiwi’ tanah air

Indonesia. Beberapa literatur yang membahas mengenai nasionalisme banyak menggunakan istilah ibu pertiwi, *fatherland*, dan tanah air yang memiliki makna penyebaran peninggalan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai hasil keturunan di dalam suatu wilayah teritorial tertentu. Karena kekuatan *parental* untuk menghasilkan kehidupan sebagai sebuah pengakuan kepada tanah yang juga merupakan sumber kehidupan (G.R, 2018, pp. 59–60).

Pancasila merupakan sebuah harta yang sangat berharga yang diteruskan dari sebuah generasi ke generasi berikutnya. Pancasila merupakan sebuah pusaka tertinggi jika kita menilik pada unsur di dalam hukum waris adat. Sehingga, eksistensi dari kelompok kerabat tersebut dapat dilihat dari eksistensinya pusaka tinggi dari kerabat tersebut. Jika Pancasila yang merupakan warisan pusaka Ibu pertiwi ini tidak diindahkan lagi oleh ahli warisnya, maka pusaka itu hanyalah sebuah benda mati.

Harta warisan di dalam konsep hukumnya pun digunakan sebagai modal awal sebuah keturunan generasi berikutnya untuk menghidupi kerabat tersebut. Hal ini jika dilihat bahwa pusaka tersebut dari sisi kebendaan materiilnya. Apabila dilihat dari sisi imateriil, pusaka ini merupakan sebuah pengingat bahwa lingkaran kerabat ini terbentuk, berkembang, dan besar karena harta pusaka tersebut. Sehingga inilah alasan mengapa harta pusaka harus diwariskan kepada keturunan asli dalam lingkaran kerabat tersebut.

Sekali lagi yang perlu ditekankan adalah bahwa Pancasila adalah harta pusaka baik secara materiil maupun imateriil dari ibu pertiwi kepada seluruh manusia

Indonesia untuk diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Secara materiil, Pancasila ini berupa kekayaan alam yang ada di Indonesia ini untuk dikelola secara berkelanjutan agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Berikutnya secara imateriil, Pancasila merupakan sebuah semangat, roh penuntun, yang berada di dalam setiap pemuda Indonesia dahulu kala untuk memperjuangkan Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Semangat ini jika tidak diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya maka tidak akan tercipta sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus terus berada di dalam setiap sanubari pemuda Indonesia sebagai ahli waris dari Ibu Pertiwi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan perubahan global ini cenderung membuat generasi muda Indonesia direkayasa untuk menjadi generasi penonton dan konsumen. sehingga dibutuhkan sebuah penguatan dan juga pemberdayaan terhadap generasi muda Indonesia. Nasionalisme dan Ideologi Pancasila yang awalnya sebagai *counter ideology* pun saatnya sekarang berkembang menjadi filter dan juga obor dalam menyaring kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Nasionalisme dan Ideologi Pancasila ini tidak hanya berhenti pada tataran retorika namun juga perlu dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata. Sehingga tak ayal lagi, generasi muda ini nanti akan menjadi generasi pelopor yang berhasil mengedalikan pikirannya secara sadar dan mengatasi kepercayaan ayau keyakinan untuk membatasi dirinya dengan mengembangkan *mindset* yang dinamis (Hariyono, 2014, p. 175).

Generasi muda yang selalu menjadi menghadapi tantangan zaman yang berbeda-beda cenderung sebagai generasi pelopor dalam menentukan keberhasilan masa depan bangsanya. Untuk menghadapi tantangan bonus demografi menuju Indonesia emas ini, orientasi utama dan paling utama untuk generasi muda adalah mengembangkan *mindset* yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam nasionalisme dan Pancasila (Hariyono, 2014, p. 174). Pergerakan arus informasi yang sangat cepat di era milenial ini sebaiknya menjadi sebuah kesempatan emas untuk semakin memperkaya nilai-nilai Pancasila dan semakin kreatif dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat

Generasi muda yang akan menjadi aktor di dalam pembangunan nasional yang berlandaskan pada nasionalisme dan Pancasila tidak akan mungkin meraih keberhasilan dan kesuksesan apabila hanya ditinjau dari bidang kesejahteraan ekonomi saja. Pembangunan nasional harus dilihat secara multidimensional yang artinya adalah pembangunan secara menyeluruh aspek-aspek manusia Indonesia. Soekarno (Hariyono, 2014, p. 179) pernah mengucapkan bahwa nasionalisme Indonesia hanya dapat hidup dan berkembang secara baik di dalam tamansari internasional. Artinya adalah dalam tantangan globalisasi dunia ini, manusia Indonesia harus membangun *mindset* Keindonesiaan. Globalisasi dunia ini mengharuskan setiap manusia beriteraksi dan berelasi dengan dunia luar, namun jangan terlalu inferior dan terlalu kagum dengan bangsa asing sehingga melupakan jati diri bangsa Indonesia.

Notonagoro sebagaimana dikutip oleh Sri Soeprpto (2013, p. 115) mengatakan bahwa kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia telah

terbentuk sejak jaman dahulu dan akan tetap menjadi identitas dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman di masa sekarang dan yang akan datang. Hakikat pribadi bangsa Indonesia merupakan penjelamaan hakikat pribadi kemanusiaan sebagai makhluk monopluralis yang dilekati kualitas-kualitas dan sifat-sifat khusus ciri watak bangsa Indonesia. Pengembangan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila tentunya mendapatkan tantangan dengan masuknya nilai-nilai rasional individualistis dari pemikiran Barat melalui Globalisasi. Pemikiran dan sikap hidup rasional bangsa Indonesia selalu diupayakan untuk tetap mengutamakan semangat kekeluargaan yang sesuai dengan sisim nilai Pancasila.

Pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda Indonesia perlu melihat dan kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Menghadapi setiap tantangan generasi muda yang selalu berubah mengikuti perubahan zaman harus dilakukan secara kreatif agar mampu menghasilkan sebuah pemikiran-pemikiran baru tanpa tercabut dari akar budayanya. Pemahaman nilai-nilai budaya, nasionalisme, dan Pancasila tidak perlu dengan menerapkan secara tekstual melainkan dengan cara-cara yang kontekstual. Integritas dan kompetensi menjadi syarat mutlak untuk menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah roh penyemangat yang progresif revolusioner menuju Indonesia emas 2045.

C. Simpulan

Menghadapi bonus demografi ini, seluruh lapisan manusia Indonesia harus melihat bahwa diperlukan sebuah penguatan nilai-nilai Pancasila agar menjadi sebuah

ideologi yang hidup. Untuk menjadi ideologi yang hidup terdapat tiga indikator yaitu adaptif-aktif, responsif, dan aplikatif. Semua indikator ini harus melihat peluang-peluang yang selalu muncul dalam setiap perkembangan zaman termasuk era milenial saat ini.

Penguatan nilai-nilai Pancasila ini sebagai sebuah orientasi yang menjadi kesepakatan bersama bahwa Pancasila merupakan harta warisan atau pusaka dari Ibu pertiwi untuk tetap menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan nilai-nilai kepada generasi muda Indonesia harus dengan cara-cara yang kreatif, kontekstual dan tetap berlandaskan pada akar budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, W. (2018, April 29). BIN Ungkap 39 Persen Mahasiswa Terpapar Radikalisme. Retrieved April 17, 2021, from Nasional website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180429023027-20-294442/bin-ungkap-39-persen-mahasiswa-terpapar-radikalisme>
- Armenia, R. (2016, April 22). Yenny Wahid: Kelompok Radikal Rekrut Mahasiswa di Kampus. Retrieved November 26, 2018, from Nasional website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160422132948-20-125837/yenny-wahid-kelompok-radikal-rekrut-mahasiswa-di-kampus>
- Ayuwuragil, K. (2017, October 8). Aduan Konten Hoax dan Radikalisme Meningkat Tajam di 2017. Retrieved November 26, 2018, from Teknologi website: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170810151445-185-233765/aduan-konten-hoax-dan-radikalisme-meningkat-tajam-di-2017>
- Damaitu, E. R. (2018). Restrukturisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Bhineka Tunggal Ika. *Dewan Guru Besar - Kongres Sumpah Pemuda "Estafet Kepemimpinan Era Milenial."* Presented at the Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada.
- Damaitu, E. R., & Saptarini, A. (2017). Moralitas Pancasila dalam Kesesatan Globalisasi. In *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Dokhi, M., Theodora Hadumaon Siagian, Sukim, Ika Yuni Wulansari, Dwi Winanto Hadi, & Noorman Sambodo. (2016). *ANALISIS KEARIFAN LOKAL DITINJAU DARI KERAGAMAN BUDAYA TAHUN 2016*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Erwanti, M. O. (2018, August 17). HUT ke-73 RI, Jokowi Ingatkan Semangat Persatuan. Retrieved November 25, 2018, from Detiknews website: <https://news.detik.com/read/2018/08/17/090117/4170505/10/hut-ke-73-ri-jokowi-ingatkan-semangat-persatuan>
- G.R, S. (2018). *Nasionalisme: Makna Bangsa, Ibu Pertiwi, Fatherland, dan Tanah Air* (F. M.M, Trans.). Surabaya: Ecosystem Publishing.
- Hariyono. (2014). *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia* (Cetakan pertama). Malang: Intrans Publishing.
- IX, P. K. P. (2018). *PANCASILA DASAR NEGARA: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kaelan, H. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis,*

- Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kuwado, F. J. (2018, August 17). Ini Pesan Jokowi di HUT Ke-73 Republik Indonesia. Retrieved November 25, 2018, from KOMPAS.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/17/14255161/ini-pesan-jokowi-di-hut-ke-73-republik-indonesia>
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Media, K. C. (2018, October 8). Bonus Demografi Indonesia Berakhir di 2036, Jumlah Lansia Bakal Naik. Retrieved November 26, 2018, from KOMPAS.com website: <https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/05440801/bonus-demografi-indonesia-berakhir-di-2036-jumlah-lansia-bakal-naik>
- News, K. (2019, September 11). BNPT: Kecenderungan Radikalisme di Indonesia Lebih dari 10 Persen. Retrieved April 17, 2021, from Kumparan website: <https://kumparan.com/kumparannews/bnpt-kecenderungan-radikalisme-di-indonesia-lebih-dari-10-persen-1sPWZ4UXXXj>
- Putra, M. A. (2017, August 14). Survei Wahid Institute: 11 Juta Orang Mau Bertindak Radikal. Retrieved November 26, 2018, from Nasional website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814172156-20-234701/survei-wahid-institute-11-juta-orang-mau-bertindak-radikal>
- Putra, Y. S. (2016). Theoretical Review: TEORI PERBEDAAN GENERASI. *Among Makarti*, Vol 9(No. 18), 12.
- Rato, D. (2017). Pancasila Sebagai Ideologi yang Hidup. In A. Khanif, M. S. Buana, & M. K. Wardaya (Eds.), *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sinal, M. (2017). *Pancasila Konsensus Negara-Bangsa indonesia*. Malang: Madani.
- Suwirta, A. (2015). Memaknai Peristiwa Sumpah Pemuda dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam Perspektif Pendidikan. *Health Education*, 12.
- Widyanto, A. B. (2010). PEMUDA DALAM PERUBAHAN SOSIAL. *Jurnal Historia Vitae*, 24(No.2), 10.
- Wirodiningrat, S. S. (2013). *Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro*. Yogyakarta: UNY Press.
- Yuswohady. (2017, November 5). Puncak Bonus Demografi 2030, Indonesia Harus Siapkan Manusia Hebat: Okezone Economy. Retrieved November 26, 2018, from <https://economy.okezone.com/> website: <https://economy.okezone.com/read/2017/11/05/320/1808672/puncak-bonus-demografi-2030-indonesia-harus-siapkan-manusia-hebat>